



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# RENCANA KERJA TAHUNAN

Stasiun KIPM Aceh

Tahun 2024

---

## KATA PENGANTAR



Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP sebagai Otoritas Kompeten penjaminan mutu hasil hasil kelautan dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir maka Stasiun KIPM Balikpapan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelayanan sertifikasi produk perikanan, pengujian laboratorium dan inspeksi secara professional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012.
2. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di tahun 2024. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Aceh untuk mewujudkan langkah penjaminan mutu tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan

Penyusunan RKT 2024 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun KIPM Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2024. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam di dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun KIPM Aceh di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



Aceh Besar, Februari 2024  
Kepala Stasiun KIPM Aceh

*(Handwritten signature)*  
Diky Agung Setiawan, S.St.Pi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
Latar Belakang .....	5
Tugas dan Peran Organisasi.....	5
Tujuan .....	6
Manfaat .....	7
Sasaran .....	7
<b>RENCANA KINERJA TAHUNAN .....</b>	<b>8</b>
Rencana Strategis.....	8
Arah Kebijakan .....	10
Sasaran Strategis BKIPM dan Indikator Kinerja.....	11
<b>PENUTUP .....</b>	<b>16</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BKIPM TA. 2024.....	12
Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Tahun 2024 .....	13
Tabel 3. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Pada Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Aceh Tahun 2024 .....	15

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2020–2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pembangunan perkarantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Balikpapan 2020-2024, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

## TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan

organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Perpres No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Permen KP No. 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan maka, pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peranan strategis sebagai Otoritas Kompeten diwujudkan dalam dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan SKIPM Aceh dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional.

Oleh karena itu Stasiun KIPM Aceh sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia. Dengan demikian peran UPT Stasiun KIPM Aceh cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor sesuai persyaratan standar yang berlaku maupun persyaratan dari negara tujuan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## **TUJUAN**

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2024.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan BPPMHKP pada Tahun 2024

## **MANFAAT**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2025. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Aceh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2024. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2024.

## **SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Aceh adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Aceh Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Aceh tahun 2020-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024.

# RENCANA KERJA TAHUNAN

## RENCANA STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia.

Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Dengan ditetapkannya Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2025, yaitu :

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman,

kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2022, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan UPT BPPMHKP merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar international.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

## **ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan tujuan dan dukungan terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan BPPMHKP - KKP

4. Memberikan jaminan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

#### **SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai SKIPM Aceh telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Balikpapan menyusun Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2020 -2024 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Aceh TA 2020 – 2024

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>						
<b>SK 1.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif</b>						
1.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (Sertifikat)	-	-	5	5	5
2.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	1	2	2	2	2
3.	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	1	2	3	2	2
4.	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (Produk)	3	22	28	28	28
5.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	10	7	11	15	15
<b>Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
<b>SK 2.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif</b>						
1.	Nilai survey kepuasan Masyarakat layanan publik (Nilai)	-	-	84	84	84
2.	Laporan usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi (Lokasi)	-	-	-	2	2
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>						
<b>SK 2.1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM</b>						
1.	Indeks profesionalitas ASN (Indeks)	72	73	83	84	84
2.	Nilai rekonsiliasi kinerja satker (Nilai)	85	85	85	85	85
3.	Persentase penyelesaian temuan BPK (%)	-	-	-	100	100
4.	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	82	65	70	75	75
5.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	88	89	89	93,75	93,75
6.	Nilai kinerja anggaran (Nilai)	-	86	81	82	82
7.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa (%)	-	-	75	77,5	77,5
8.	Tingkat kepatuhan BMN (%)	-	-	75	77,5	77,5
10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK (Nilai)	-	-	-	75	75

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Aceh	5
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Aceh	2
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM Aceh	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Aceh	30
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Aceh	15
<b>Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Aceh	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Aceh	2
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>				
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Aceh	84
		9	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup SKIPM Aceh	85
		10	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Aceh	100
		11	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Aceh	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Aceh	93,75
		13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Aceh	82
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup SKIPM Aceh	77,5
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup SKIPM Aceh	77,5
		16	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK lingkup SKIPM Aceh	75

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPMHKP lainnya

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pematapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan

logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importir lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dalam kegiatan proses produksinya serta kemampuan telusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pada SKIPM Aceh tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 5.281.146.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Aceh untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali dengan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Aceh Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	228.700.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	711.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	4.340.946.000
<b>Total Anggaran BKIPM Balikpapan Tahun 2024</b>		<b>5.281.146.000</b>

## PENUTUP

- ✚ Penyusunan rencana kerja Tahun Anggaran 2024 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun KIPM Aceh antara lain :
  1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif;
  2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif;
  3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.
  
- ✚ Total rencana alokasi anggaran per kegiatan SKIPM Aceh pada tahun 2024 sebesar **Rp. 5.281.146.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :
  1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian Mutu sebesar **Rp. 228.700.000,-**
  2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan sebesar **Rp. 711.500.000**
  3. Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP sebesar **Rp. 4.340.946.000,-**